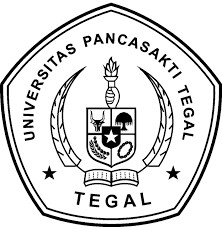
****

**PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS *ENTERTAINMENT TAX*, *ADVERTISEMENT TAX*, DAN *TAX ON ACQUISITION OF RIGHT TO LAND AND BUILDINGS* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dwi Elma Septiani**

**NPM: 4320600059**

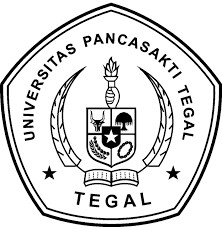
Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

****

**PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS *ENTERTAINMENT TAX*, *ADVERTISEMENT TAX*, DAN *TAX ON ACQUISITION OF RIGHT TO LAND AND BUILDINGS* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Dwi Elma Septiani**

**NPM: 4320600059**

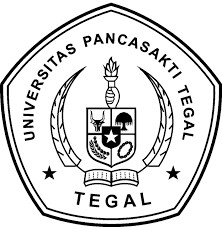
Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

****

**PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ENTERTAINMENT TAX, ADVERTISEMENT TAX, DAN TAX ON ACQUISITION OF RIGHT TO LAND AND BUILDINGS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

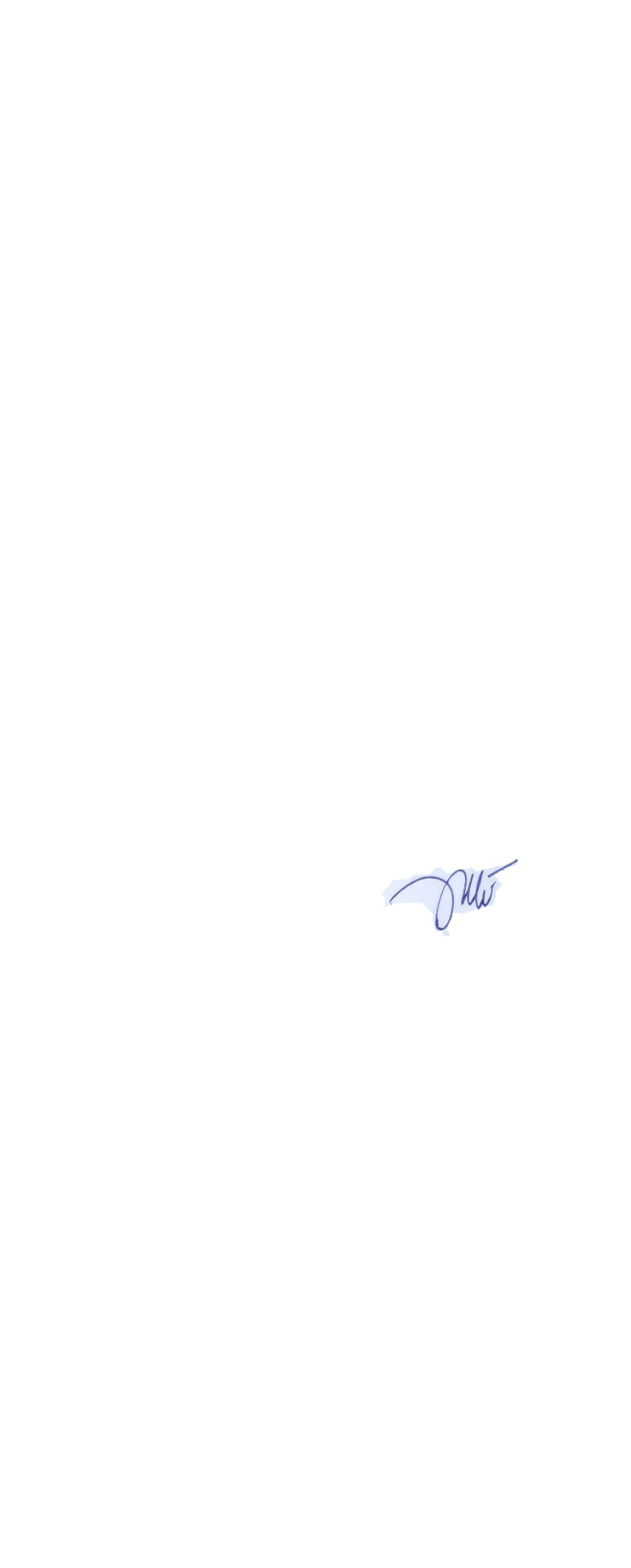
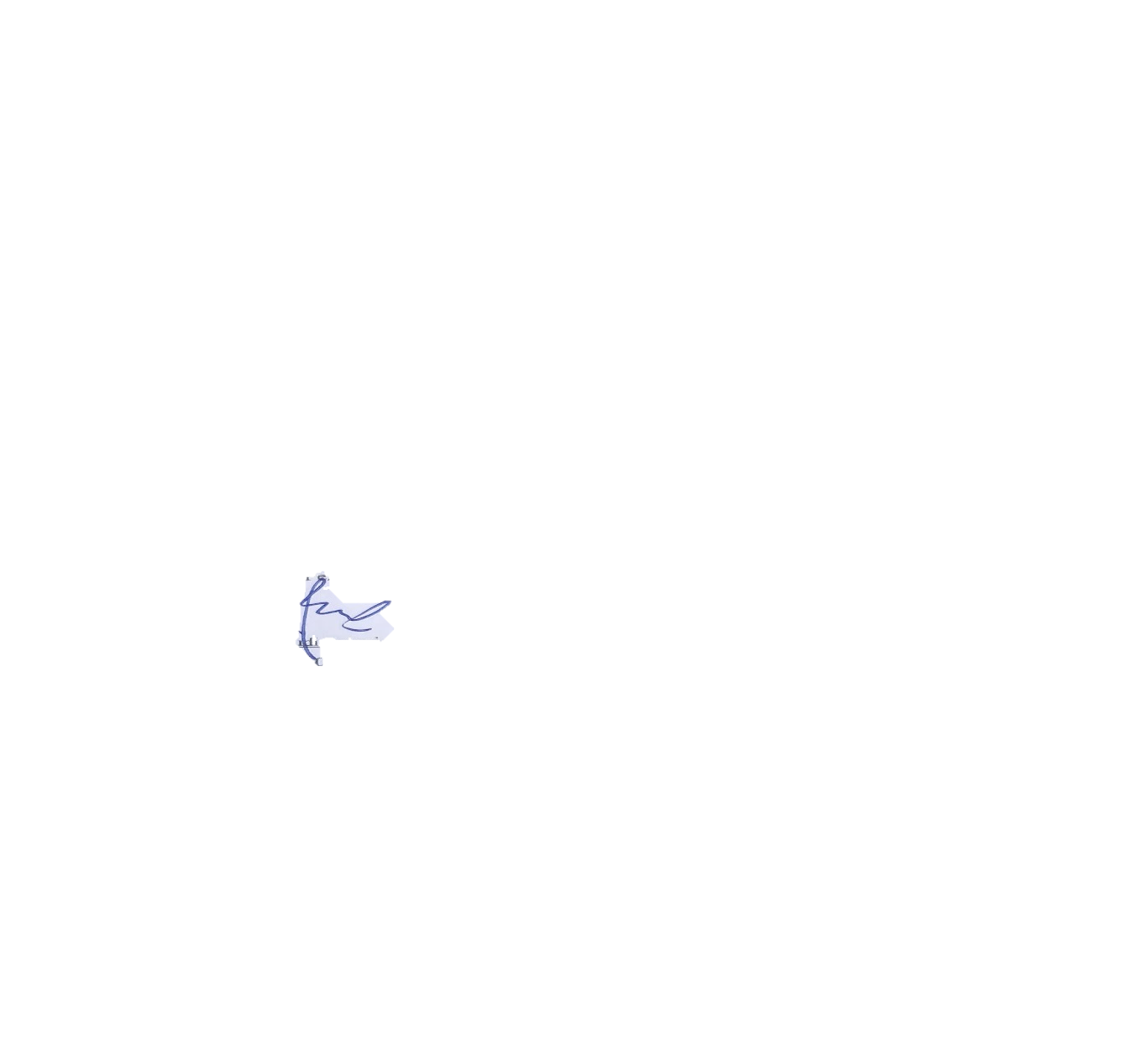
**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dwi Elma Septiani NPM: 4320600059**

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi Tanggal: 21 Juni 2024**

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

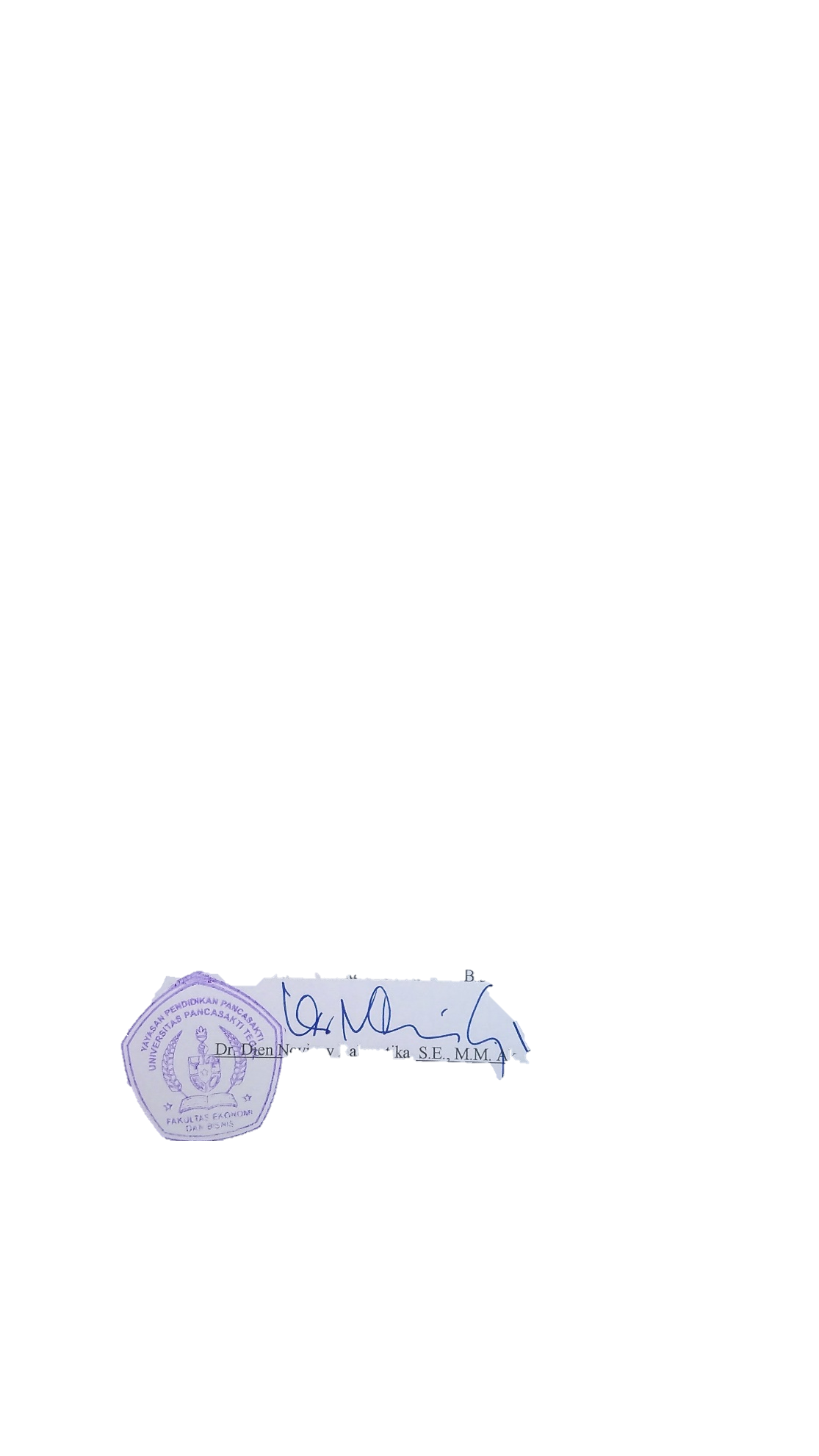


Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt

NIDN. 0615057601 NIDN. 0602037002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M, Ak, C.A

NIDN. 0628117502

**Pengesahan Skripsi**

Nama : Dwi Elma Septiani

NPM : 4320600059

Judul : Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Entertainment Tax, Advertisement Tax, Dan Tax On Acquisition Of Roght To Land And Buildings Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 21 Juni 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ketua Penguji |  |
|  |  |  |
|  | Dr. Abdulloh Mubarok., S.E., M.M., Ak., CA  NIDN. 0331077302 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dr. Dewi Indriasih, S.E., M., Ak  NIDN. 0616058002 | Dr. Abdulloh Mubarok., S.E., M.M., Ak., CA  NIDN. 0331077302 | Budi Susetyo, S.E., M.Si  NIDN. 0623117101 |

|  |
| --- |
| Mengetahui,  Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
|  |
| Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA  NIDN. 0628117502 |

# 

# MOTTO DAN PERSEMBBAHAN

**MOTTO**

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjungkan hari ini.”

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang sangat berharga dalam hidup saya. Mereka sangat berperan penting dalam memberikan cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, serta doa yang selalu mereka berikan. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk menapai cita-cita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas dukungannya selama ini.

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dwi Elma Septiani

NPM : 4320600059

Program studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

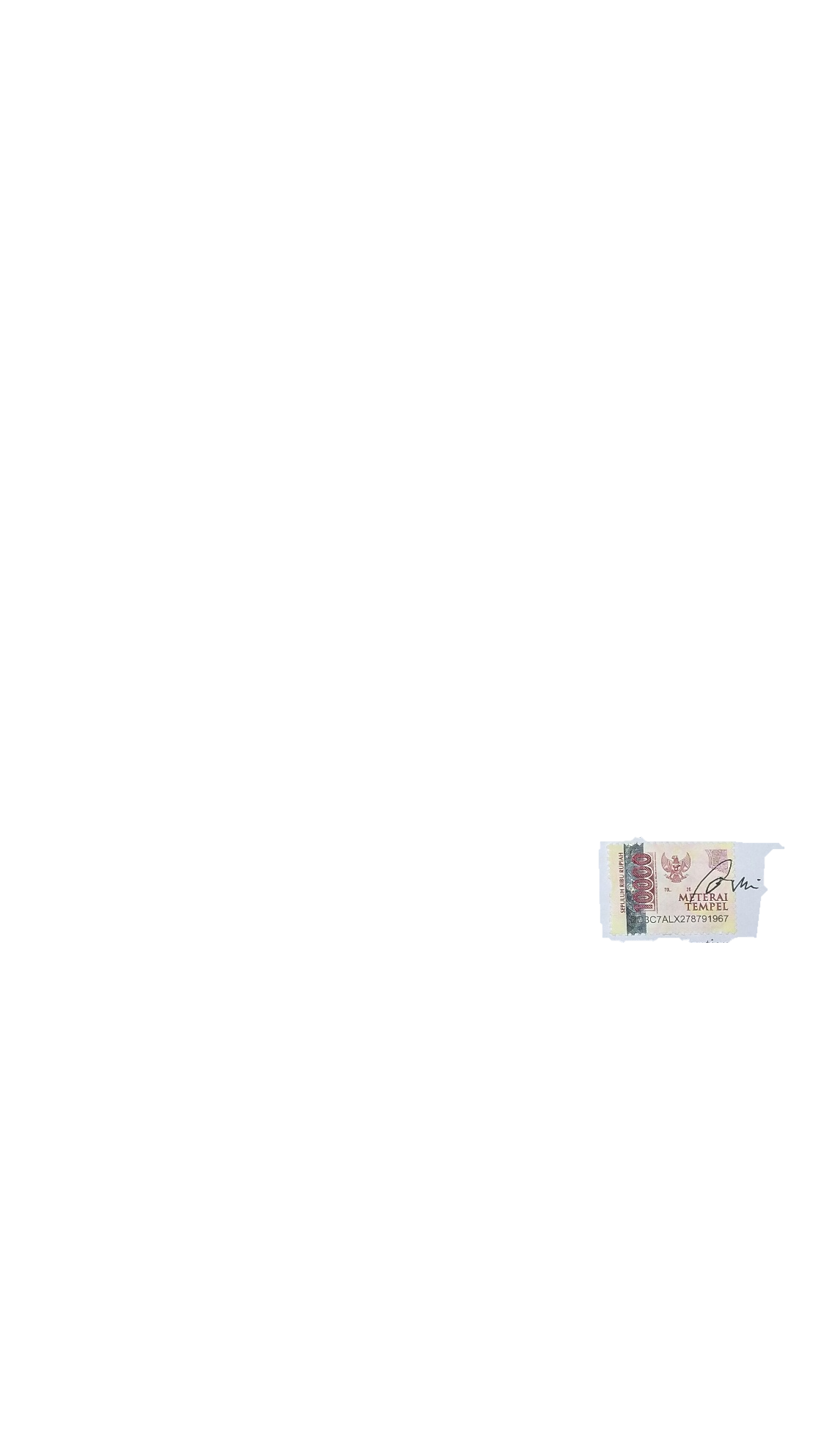
**“Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Entertainment Tax, Advertisement Tax, Dan Tax On Acquisition Of Roght To Land And Buildings Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.”**

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan / atau pemalsuan data maupn bentuk- bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan unttk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan



Dwi Elma Septiani

# 

# ABSTRAK

**Dwi Elma Septiani, 2024, Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas *Entertainment Tax,* *Advertisement Tax*, Dan *Tax On Acquisition Of Roght To Land And Buildings* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh kontribusi dan efektivitas *Entertainment Tax, Advertisement Tax* dan *Tax Acquisition Of Right To Land And Buildings* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018-1022. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Entertainment Tax, Advertisement Tax* dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah realisasi pajak daerah dan realisasi PAD periode 2018-2022. Data sekunder di analisis menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas. Selanjutnya untuk pembuktian hipotetsis dilakukan melalui Uji F dan Uji t. Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dibukikan dengan nilai signifikansi 0,237 > 0,05, pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,115 > 0,05 sedangakn BPHTB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,019 < 0,05. Hasil uji F mejunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen denagn nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan pajak hiburan, pajak reklame dan BPHTB mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya variabel pendapatan asli daerah sebesar 95,5%.

**Kata kunci*:*** *Entertainment Tax, Advertisement Tax Dan Tax Acquisition Of Right To Land And Buildings*, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**ABSTRACT**

**Dwi Elma Septiani, 2024, *The Influence Of The Contribution And Effectiveness Of Entertainment Tax, Advertisement Tax, And Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings On Original Income Of The Region Of Pemalang District.***

*This research aims to understand the influence of the contribution and effectiveness of Entertainment Tax, Advertisement Tax and Tax Acquisition Of Right To Land And Buildings on Pemalang Regency's Original Regional Income in 2018-1022. Apart from that, this research also aims to determine the influence of Entertainment Tax, Advertisement Tax and Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings on Regional Original Income of Pemalang Regency partially and simultaneously. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach. The sample used in this research is regional tax realization and PAD realization for the 2018-2022 period. Secondary data was analyzed using contribution and effectiveness analysis. Next, proving the hypothesis is carried out through the F test and t test. The results of the t test show that entertainment tax partially has no significant effect on PAD, proven by a significance value of 0.237 > 0.05, advertising tax partially has no significant effect on PAD, proven by a significance value of 0.115 > 0.05, while BPHTB partially has a significant effect on PAD. proven by a significance value of 0.019 <0.05. The results of the F test show that the independent variable has a significant effect on the dependent variable with a significance value of 0.000 <0.05. Apart from that, the results of the coefficient of determination (R2) show that entertainment tax, advertising tax and BPHTB are able to explain variations in the ups and downs of the local original income variable by 95,5%.*

***Key Word:*** *Entertainment Tax, Advertisement Tax Dan Tax Acquisition Of Right To Land And Buildings, Regional Origional Income* *(PAD)*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas *Entertainment Tax*, *Advertisemen Tax*, Dan *Tax on Acquisition Of Right To Land And Buildings* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M, Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E., M.M, Ak, C.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budiraharjo, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan saran, masukan dan motivasi kepada penulis.
4. Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan memotivasi penulis.
5. Orang tua serta saudara yang selalu memberi dukuangan dan memberi doa dalam menyusun skripsi.
6. Teman – teman dekat saya yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
7. Ketua BPKAD dan BAPPENDA Kabupaten Pemalang beserta staf atas kesempatan dan bantuan yang di berikan kepada peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 24 Juni 2024

Dwi Elma Septiani

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL .. i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…….....………………………….. ii**

PENGESAHAN SKRIPSI [iv](#_Toc174997996)

[MOTTO DAN PERSEMBBAHAN v](#_Toc174997997)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI [vi](#_Toc174997998)

[ABSTRAK vii](#_Toc174997999)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc174998000)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc174998001)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc174998002)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc174998003)

[BAB I 1](#_Toc174998004)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc174998005)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc174998006)

[B. Rumusan Masalah 15](#_Toc174998007)

[C. Tujuan Penelitian 16](#_Toc174998008)

[D. Manfaat Penelitian 16](#_Toc174998009)

[1. Manfaat Teoritis 16](#_Toc174998010)

[2. Manfaat Praktis 17](#_Toc174998011)

[BAB II 18](#_Toc174998012)

[TINJAUAN PUSTAKA 18](#_Toc174998013)

[A. Landasan Teori 18](#_Toc174998014)

[1. *Stakeholder Theory* 18](#_Toc174998015)

[2. Pajak 19](#_Toc174998016)

[3. Pajak Derah 24](#_Toc174998017)

[4. *Entertainment Tax* (Pajak Hiburan) 25](#_Toc174998018)

[5. *Advertisement Tax* (Pajak Reklame atau Pajak Iklan) 27](#_Toc174998019)

[6. *Tax On Acquisition Of Righht To Land And Buildings* (Pajak Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 29](#_Toc174998020)

[7. Pendapatan Asli Daerah 33](#_Toc174998021)

[8. Kontribusi 34](#_Toc174998022)

[9. Efektivitas 35](#_Toc174998023)

[B. Penelitian Terdahulu 36](#_Toc174998024)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 45](#_Toc174998025)

[BAB III 52](#_Toc174998026)

[METODE PENELITIAN 52](#_Toc174998027)

[A. Jenis Penelitian 52](#_Toc174998028)

[B. Populasi 53](#_Toc174998029)

[C. Sampel 53](#_Toc174998030)

[D. Devinisi Konseptual dan Operasional Variabel 54](#_Toc174998031)

[E. Jenis dan Sumber Data 59](#_Toc174998032)

[F. Metode Pengumpulan Data 59](#_Toc174998033)

[G. Metode Analisis Data 60](#_Toc174998034)

[1. Analisis Deskriptif 60](#_Toc174998035)

[2. Uji Asumsi Klasik 63](#_Toc174998036)

[3. Analisis Regresi Berganda 65](#_Toc174998037)

[4. Pengujian Hipotesis 66](#_Toc174998038)

[5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 67](#_Toc174998039)

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang 6

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Pemalang 9

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Pemalang 10

Tabel 1.4 Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Pemalang 11

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 36

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 57

Tabel 3.2 Klasifikasi Nilai Kontribusi 61

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas 62

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 50

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembangunan daerah memiliki tujuan penting yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan suatu wilayah atau kawasan. Banyak faktor yang terlibat dalam proses pembangunan daerah, seperti lingkungan, sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kelestarian lingkungan merupakan tiga tujuan utama pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari aspek peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, peningkatan kemakmuran masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu keberhasilan pembangunan daerah tida terlepas dari pendanaan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai sumber pendanaan yang besar bagi pemerintah daerah, pembangunan daerah banyak menitik beratkan pada pendapatan asli daerah atau PAD. PAD sangat penting untuk menjamin kemandirian finansial dan mendorong pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah. Wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperluas pembangunan ekonomi daerah. Konsep otonomi daerah yaitu sistem desentralisasi dimana pemerintah regional, lokal maupun kota membagi wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah federal atau pusat. Konsep otonomi daerah di Indomesia dengan disahkannya UU No 22

tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan-peraturan yang mengikutimnya. Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah darerah untuk mengelola sumber daya keuangan termasuk pajak dan pengeluaran anggaran, mengelola sumber daya manusia dan dalam menyelenggarakan layanan publik, serta mengembangkan kebijakan ekonomi.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah semua uang yang diterima daerah dari sumber daya di tanahnya sendiri dinilai sesuai dengan hukum setempat yang relevan dengan pedoman yang diamanatkan secara hukum berlaku (Samosir, 2020). Kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pndapatan Asli Daerahnya. Pendapatan daerah menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal tersebut membuktian bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah mengalami penurunan atau semakin sedikit, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendaptan lain-lain yang sah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah, ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah itu sendiri. Seperti pembangunan jembatan, jalan, penataan taman kota, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya.

Pemerintah daerah harus menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sistem perpajakannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran dan mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pajak daerah yaitu kebijakan perpajakan, administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang ialah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Pemalang ialah salah satu wilayah kabupaten pada provinsi Jawa Tengah yang ikut pada pelaksanakan otonomi daerah. Yang sudah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber ekonomi yang terdapat sesuai dengan potensi serta keadaan wilayah. Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah, besar kecilnya penerimaan pajak daerah tergantung di jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah dalam memutuskan batas maksimum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Pemda diperlukan bisa melakukan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah untuk menaikkan keuangan wilayah. Upaya demikian dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan wilayah guna menaikkan ekonomi wilayah Kabupaten Pemalang. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Pemalang salah satunya yaitu pajak hiburan, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

*Entertainment tax* atau pajak hiburan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, bahwa yang menjadi obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud antra lain: 1. Tontonan film; 2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana; 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. Pameran; 5. Diskotik, karaoke, klab dan sejenisnya; 6. Sirkus, akrobat dan sulap; 7. Permainan bilyar dan boling; 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan 10. Pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Penelitian terkait dengan pajak hiburan pernah dilakukan oleh Alkholifi & Sofianty, (2021) adanya anggapan bahwa Pajak Hiburan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis peneliti diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang sangat memperoleh manfaat dari kontribusi Pajak Hiburan.

*Advertisement tax* atau pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelengaaraan Pajak Reklame, menyatakan “Reklame (iklan) adalah benda, instrumen, aktivitas, atau media dengan wujud dan gaya yang berbeda-beda, yang diciptakan untuk tujuan bisnis, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat umum, benda, jasa, individu, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dapat didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati. Penelitian mengenai pajak reklame yang dilakukan oleh Yadi & Hernawati, (2021) secara persial bahwa kontribusi dan efektivitas pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan trehadap PAD sedangakan potensi pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Secara simultan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumedang.

*Tax on aquisition of righ to land and buildings* atau BPHTB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, 2010 menyatakan “Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan untuk memperoleh tanah dan/atau bangunan”, serta “Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan, hak atas tanah meliputi hak pengelolaan di samping hak-hak tersebut di atas”.

Penelitian mengenai BPHTB pernah dilakukan oleh Ayem & Hamrin, (2021) mengatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupaya mengelola biaya hak bangunan dan hak atas tanah sebagai salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pembangunan daerah.

Berikut presentase realiasi penerimaan pajak Kabupaten Pemalang tahun 2018 - 2022:

**Tabel 1.1**

**Presentase Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajak Daerah | Tahun | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pajak hotel | 143,75% | 150,03% | 100,63% | 86,27% | 86,10% |
| Pajak restoran | 152,57% | 165,26% | 111,09 % | 103,09% | 114,02% |
| Pajak hiburan | 136,61% | 132,16% | 89,92 % | 35,52% | 74,01% |
| Pajak reklame | 104,52% | 114,27 % | 103,31% | 93,09% | 95,76% |
| Pajak penerangan jalan | 105,42% | 101,64% | 100,69% | 101,15% | 100,92% |
| Pajak mineral bukan logam & batuan (pasir dan kerikil) | 103,79% | 185,61% | 134,43% | 74,11% | 148,49% |
| Pajak parkir | 172,90% | 132,93% | 112,82% | 140,86% | 136,27% |
| Pajak air bawah tanah | 138,97 % | 151,03% | 89,72% | 136,19% | 102,43% |
| Pajak sarang burung walet | 136,50% | 115,00% | 292,86 % | 74,07% | 82,79% |
| Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan | 221,35% | 149,81% | 121,97% | 125,16% | 115,78% |
| Pajak bumu & bangunan | 101,41% | 116,09% | 129,57% | 104,10% | 110,54% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pemalang, (2023)

Dari tabel 1.1 dapat di lihat pada tahun 2018 pendapatan paling besar di terima dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 221, 35%. Pada tahun 2019 pendapatan paling tinggi di terima dari Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (pasir dan kerikil) sebesar 185,61%. Di tahun 2020 dan 2021 pendapatan pajak paling tinggidiperoleh dari Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir sebesar 292,86% dan 100,15%. Pada tahun 2022 pendapatan pajak paling besar di peroleh dari Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (pasir dan kerikil) sebesar 148,49%. Dari tabel realisasi pendapatan pajak di atas yang telah di olah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukan setiap tahunnya pendapatan tersebut selalu mengalamai fluktuasi atau berubah-ubah. Dari ketiga pajak yaitu pajak hiburan, pajak reklame dan pajak bea peolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi fluktuasi akibat peraturan dan tarif pajak yang berubah, adanya hambatan dalam pemungutan pajak serta potensi pajak yang kurang tergali secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al., (2023) dengan judul “Analisis Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Meningkatkan PAD Kabupaten Pemalang”, menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 64.270.887.023 dengan presentase sebanyak 6,98% ini merupakan realisasi penerimaaan pajak daerah terendah selama tahun 2017-2021 hal ini karena adanya pajak hotel mengalami penurunan sebab kurangnya jadwal yang intensif untuk monitoring, penilaian serta supervisi. Tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan sebanyak 76.107.419.624 dengan presentase sebesar 7,18%. Pada tahun 2019 realisasi mengalami peningkatan kembali sebesar 87.622.428.980 dengan presentase sebesar 6,88%. Lalu tahun 2020 realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar 80.569.759.532 dengan presentase sebayak 7,20%. Sedangkan Tahun 2021 realisasi pajak daerah mengalami kenaikan kembali sebesar 88.731.761.139 dengan presentase sebanyak 7,56% hal ini adanya peningkatan kembali pajak parkir sebab adanya pemulihan ekonomi sesudah pandemi Covid-19 perlahan mereda di kuartal keempat tahun 2021. presentase kontribusi pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 rata-ratanya mencapai 7,16% yang masih dibawah 10% dapat dikatakan berada pada kriteria sangat kurang.

Hal ini disebabkan adanya faktor Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola untuk meningkatkan pelayanan serta peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD Selain elektronifikasi system pemungutan pajak daerah maka dibutuhkan pemugaran tata kelolanya.

Data terkait dengan target dan realisasi pendapatan dari tiga pajak yaitu pajak hiburan, apajak reklame dan pajak BPHTB Kabupaten Pemalang sebaagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | % |
| 2018 | Rp. 270.000.000 | Rp. 368.842.557 | 136,61 % |
| 2019 | Rp. 270.000.000 | Rp. 356.833.209 | 132.16 % |
| 2020 | Rp. 201.000.000 | Rp. 180.748.275 | 89,92 % |
| 2021 | Rp. 370.000.000 | Rp. 131.434.227 | 35,52 % |
| 2022 | Rp. 300.000.000 | Rp. 222.023.650 | 74, 01 % |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pemalang, 2023

Pendapatan pajak hiburan Kabupaten Pemalang yang diperoleh dari BPKAD pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 368.842.557 pendapatn tersebut sudah melebihi target yang diteteapkan, tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 356.833.209 sudah melebihi target akan tetapi menurun dari pendapatan tahaun sebelumnya. Kemudian tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 180.748.275 pendapatan tersebut tidak melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 2021 sebesar Rp. 131.434.227 pendapatan tersebut jauh dari target yang ditetapkan dan menurun dari pendapatan tahun lalu. Tahun 2022 pendapatan sebesar Rp. 222.032.650 masih belum melampaui target namun sudah cukup meningkat di banding tahun 2021.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa target pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hiburan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dan nilai realisasinya juga mengalami kenaikan dan penurunan. Keadaan tersebut terjadi akibat beberapa faktor masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang adalah objek pajak hiburan yang di dalamnya tidak memiliki izin yang jelas sehingga tidak terdaftar sebagai objek pajak hiburan. Tidak tetapnya wajib pajak hiburan menjadi kendala juga bagi pemerintah daerah untuk menentukan target karena tidak terprediksi objek pajaknya. Masalah tersebut apabila di biarkan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan pengeawasan serta kesadaran para penyelenggara hiburan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

**Tabel 1.3**

**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | % |
| 2018 | Rp. 1. 250.000.000 | Rp. 1.306.561.438 | 104,52 % |
| 2019 | Rp. 1.250.000.000 | Rp. 1.428.315.981 | 114,27% |
| 2020 | Rp. 1 275.000.000 | Rp. 1.317.148.625 | 103,31 % |
| 2021 | Rp. 1.600.000.000 | Rp. 1.489.385.737 | 93,09 % |
| 2022 | Rp. 1.642.946.000 | Rp. 1.573.230.063 | 95,76 % |

Sumber:BPKAD Kabupaten Pemalang, 2023

Pendapatan pajak reklame yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Pemalang, pada tahaun 2018 – 2020 pendapatan pajak sebesar Rp. Rp. 1.306.561.438, Rp. Rp. 1.428.315.981 dan Rp. Rp. 1.317.148.625 pendapatan tersebut sudah melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian tahun 2021 sebesar Rp. 1.489.385.737 pendapatan tersebut menurun dari tahyn-tahun sebelumnya dan tidak bisa melampaui targetnya, tahun 2022 sebesar Rp. 1.573.230.063 pendapatan pajak reklame masih belim sesai dengan target namun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnnya.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa target pendapatan pajak daerah dari sektor pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan di sertai realisasinya. Kondisi tersebut terjadi sebab adanya masalah dalam sektor pajak reklame yaitu masih adanya reklame yang terpasang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perijinannya sudah mati, reklame ilegal, reklame terpasang tidak sesuai titik dan standar keamanan dan reklame yang tidak membayar pajak. Masalah umum ini apabila dibiarkan akan berdampak pada tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan juga tata ruang publik. Maka dalam hal ini diperlukan peran pentingnya ketegasan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan penertiban dan pengawasan reklame serta kesadaran para penyelenggara reklame dalam meningkatkan pendapatan pajak.

**Tabel 1.4**

**Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | % |
| 2018 | Rp. 9.000.000.000 | Rp. 19.921.144.634 | 221,35 % |
| 2019 | Rp. 16.485.000.000 | Rp. 24.695.865.973 | 149,81 % |
| 2020 | Rp. 18.180.000.000 | Rp. 22.173.726.238 | 121, 97 % |
| 2021 | Rp. 20. 800.000.000 | Rp. 26.034.024.705 | 125, 16 % |
| 2022 | Rp. 21. 500.000.000 | Rp. 24.892.158.448 | 115, 78 % |

Sumber: BPKAD Kabupaten Pemalang, 2023

Tabel 1.4 menyajikan pendapatan pajak BPHTB yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Pemalang menunjukkan pendapatan tersebut selama 2018-2022 sudah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah disetiap tahunnya. Namun dalam pemungutan pajak tersebut tidak terlepas dari masalah yang menghambat kontribusi dan efektivitasnya bagi pendapatan daerah.

Masalah yang dihadapi dalam sektor BPHTB yaitu kekurangtahuan dari wajib pajak terhadap aturan hukum yang berlaku, terutama dibidang pajak. Dengan sistem *self assessment* dari BPHTB, dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajaknya yang harus dibayarkan. Berdasarkan keadaan di atas wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengurus sendiri hal tersebut. Kemudian masalah yang berhubungan dengan perhitungan BPHTB, ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara perhitungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena dalam kenyataannya, wajib pajak melakukan perhitungan tidak sesuai dengan yang semestinya sehingga wajib pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan terdapat kekurangan dari jumlah yang seharusnya disetorkan karena adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan. Masalah tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kontribusi serta efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang ataupun pegawai pajak dapat mensosialisasikan tentang berbagai macam pajak yang ada serta menyediakan sarana yang lebih mudah dalam menghitung BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Masalah di atas memerlukan uapaya atau strategi agar pemungutan pajak hiburan, pajak reklame dan BPHTB dapat dilakukan secara optimal. Pertama, diperlukan ketersediaan data potensi pajak hiburan dan pajak reklame secara valid. Data tersebut akan menentukan besar pajak daerah yang dapat dipungut sehingga dapat diketahui besar target penerimaan pada suatu periode. Kedua, mengefektifkan sistem pelaporan melalui e-tax sebagai konskuensi sistem *self assessment*. Prinsipnya, wajib pajak harus dimudahkan dalam melakukan pelaporan pajak terutang dengan tidak memerlukan proses yang rumit. Ketiga, mengefektifkan proses penagihan. Keempat, pemantauan aktivitas perpajakan wajib pajak. Untuk mengoptimalkan/meningkatkan pemungutan pajak maka perlu dilakukan strategi-strategi dan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui besaran tingkat efektivitas dan tingkat kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Melihat fenomena dari ke tiga pajak diatas yang mengalami masalah dalam pemungutan serta perhitungan pajaknya yang menyebabkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang berubah-ubah dan kurang maksimal sehingga secara tidak langsung mempengarui pendapatan daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kontribusi dan efektivitas dari ke tiga pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitin sebelumnya yaitu dari segi variabel bebas yang digunakan dan tempat yang di jadikan sebagai penelitian.

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan yang di lakukan oleh Sihite & Mulyandani, (2021) Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020 sebesar 0,044, pajak restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020 terhadap PAD sebesar 0,097, Secara simultan pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD namun tidak signifikan serta Kontribusi pajak hiburan dan pajak retoran berada dalam kategori kurang selama tahun 2016 – 2020 pada Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikam et al., (2023) mengugkapkan bahwa Dari hasil uji statistik terlihat bahwa pajak reklame secara parsial mempunyai dampak besar terhadap pendapatan asli daerah. Statistik menunjukkan bahwa pajak periklanan mempunyai dampak yang signifikan pendapatan asli daerah sebagai dampak tumbuhnya kawasan komersial dan atraksi gastronomi seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan restoran Seribu Rasa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pandu, (2023) mengungkapkan bahwa Dengan uji statistik menggunakan uji t pada taraf signifikansi 5% dan nilai sig 0,001 lebih kecil dari nilai alpha maka variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BPHTB mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang bahwa penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Kurang maksimal penerimaan ke tiga pajak tersebut dapat di sebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dari segi lembaga maupun petugas pemungutan pajak, rendahnya pemahaman mengenai perpajakan oleh wajib pajak dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sehingga kendala-kendala tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah di suatu wilayah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas *Entertainment Tax*, *Advertisement Tax*, Dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang”.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *entertainment tax* (pajak hiburan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang?
2. Apakah *advertisement tax* (pajak reklame atau pajak iklan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang?
3. Apakah *tax on acquisition of right to land and buildings* (pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengatahui pengaruh *entertainment tax* (pajak hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *advertisement tax* (pajak reklame) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax on acquisition of right to land and buildings* (pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

## Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

### Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak perolehan tanah dan bangunan, maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat diterapkan di dunia nyata.

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti berikutnya di bidang yang sama.

### Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pendapatan pendapatan daerah di Kabupaten Pemalang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian oleh pemerintah untuk mengukur kontribusi dan efektivitas pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi perolehan. hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat mempelajari lebih lanjut tentang pajak dan struktur pajak, mendapatkan wawasan tentang kinerja pemerintah daerah, dan menjadi sumber daya untuk penelitian tambahan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

### *Stakeholder Theory*

*Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stakeholder theory.* Menurut teori pemangku kepentingan, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki wewenang untuk mengajukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut (Sanga et al., 2018).

Berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011, Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi kinerja, kelangsungan hidup, dan kelangsungan organisasi dianggap sebagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak ini dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemangku kepentingan eksternal adalah masyarakat yang tidak terafiliasi dengan lembaga atau organisasi pemerintah, namun tetap perlu mendapat informasi guna menjalin hubungan kerja yang positif. Pemangku kepentingan internal adalah anggota audiens atau publik yang berpartisipasi dalam operasional organisasi atau lembaga. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder.

Menurut Putro (2013) dalam jurnal Sanga et al., (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka” menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut menyatakan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan. Timbal balik semacam ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Masyarakat maupun pemerintah daerah perlu memiliki rasa kepercayaan terhadap masing-masing pihak dalam menjalankan amanatnya sebagai stakeholder.

### Pajak

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang dari seseorang atau suatu organisasi dalam keadaan hukum yang memaksa. Pajak dibayarkan kepada pemerintah untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajaningkrat adalah menurut peraturan pemerintah yang dapat diberlakukan, perpajakan adalah kewajiban memindahkan sebagian kekayaan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu; Namun, tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan umum (Resmi, 2019).

N. J. Feldman, sebaliknya, mengartikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah prestasi yang dikenakan secara sepihak oleh penguasa dan terhutang kepadanya (sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum), tanpa ada tandingan kinerja, dan digunakan secara eksklusif, untuk menutupi pengeluaran umum." (Resmi, 2019).

Dari definisi yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang dipungut dan bersifat memaksa dan negara tidak memperoleh timbal balik secara langsung.

(Suandy, 2008), terdapat jenis-jenis pajak yang dikelompokkan, sebagai berikut:

* + - 1. Menurut Golongannya
         1. Pajak langsung

Pajak langsung, merupakan pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak wajib dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.

* + - * 1. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang mempunyai kemampuan dapat dialihkan atau di pindahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

* + - 1. Menurut Pemungutannya
         1. Pajak pusat atau pajak negara

Pajak negara atau pusat merupakan pajak yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk memungut pajak tersebut.

* + - * 1. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungutnya.

* + - 1. Menurut Sifatnya
         1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang mempertimbangkan situasi atau keadaan wajib pajak. Harus ada faktor obyektif yang terkait langsung dengan keadaan relevan untuk menentukan pajak.

* + - * 1. Pajak obkektif

Pajak obyektif adalah pajak yang mencari subjeknya, yang dapat mencakup orang dan benda, setelah terlebih dahulu memusatkan perhatian pada hal yang menimbulkan kewajiban membayar.

Menurut (Sihombing & Sibagariang, 2020), fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi Budgeter (Fungsi Anggaran)

Pajak merupakan sumber pendanaan negara; mereka mengumpulkan uang dari pembayar pajak dan menyetorkannya ke kas negara untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional dan belanja negara lainnya.

1. Fungsi Regulasi (Fungsi Mengatur)

Pajak merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan sosial dan ekonomi suatu negara. Peran regulasi antara lain: mengurangi tingkat inflasi, mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor atas barang, pembelaan terhadap barang produksi dalam negeri dan mengatur dan menarik investasi modal yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

1. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan antara kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat serta distribusi pendapatan.

1. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Misalnya, pemerintah mungkin memutuskan untuk mengenakan pajak yang tinggi untuk memerangi inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sementara itu, pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah memungkinkan peningkatan jumlah uang yang beredar, sehingga membantu memerangi deflasi dan kemerosotan ekonomi.

Kerangka atau sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Sihombing & Sibagariang, (2020) cara yang digunakan untuk menentukan berapa besarnya pajak yang wajib dibayar kepada negara sebagai pajak wajib disebut dengan Sistem Pemungutan Pajak. Terdapat 3 jenis kerangka atau sistem pemungutan pajak antara lain:

1. *Self assessment system.*

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang menyulitkan dalam menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang secara aktif berpartisipasi dalam penghitungan, penyetoran, dan pengungkapan jumlah pajak ke kantor KPP atau melalui sistem administrasi online yang disediakan pemerintah dianggap sebagai wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Teknik evaluasi diri digunakan untuk berbagai jenis pajak pusat, Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini melepaskan kewenangan pemungut pajak untuk memastikan besarnya pajak yang terutang kepada fiskus atau otoritas perpajakan. Wajib Pajak bersifat pasif dalam sistem pemungutan pajak ketetapan resmi, dan pajak yang terutang baru terwujud setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. KerangkaUang yang dipungut dari pajak ini dapat digunakan untuk melunasi pajak daerah jenis lain atau pajak bumi bangunan (PBB).

1. *With holding system*

Dalam sistem pemotongan, pihak ketiga yang bukan wajib pajak, pejabat pajak, atau pejabat keuangan menghitung jumlah pajak. Ilustrasi sistem holding adalah pemotongan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait dari pendapatan karyawan.

Di Indonesia, sistem pemotongan diterapkan pada jenis pajak berikut: PPN, PPh final pasal 4 ayat (2), PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23.

### 3. Pajak Derah

Pajak daerah menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tentang Pajak Daerah dikatakan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak dan Retribusi daerah, Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang luas, sejati, dan bertanggung jawab, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada pajak dan retribusi daerah.

Sumber penerimaan pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak-pajak yang berlaku adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak informasi jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah. dan bangunan.

### *Entertainment Tax* (Pajak Hiburan)

*Entertaiment tax* atau pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Dapat pula diartikan pajak hiburan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan (Kamaroellah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 18 bahwa yang menjadi obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud antra lain: 1. Tontonan film; 2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana; 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. Pameran; 5. Diskotik, karaoke, klab dan sejenisnya; 6. Sirkus, akrobat dan sulap; 7. Permainan bilyar dan boling; 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan 10. Pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dasar pengenaan *entertaiment tax* (pajak hiburan) adalah jumlah uang yang dterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertunjukan dan/atau keramaian yang menggunakan sarana film dalam gedung sebesar 25% dan di luar gedung sebesar 15%.
2. Pertunjukan kesenian rakyat atau tari tradisional sebesar 10%.
3. Hiburan berupa:
4. Pagelaran busana sebesar 30%.
5. Kontes kecantiakn sebesar 30%.
6. Diskotik sebesar 40%.
7. Karaoke sebesar 25%.
8. Klab malam dan sejenisnya sebesar 40%.
9. Panti pijat sebesar 25%.
10. Mandi uap atau spa sebesar 40%.
11. Pertunjukan musik, pameran atau tontonan modern sebesar 20%.
12. Permainan bilyar sebesar 20%.
13. Permainan boling sebesar 30%.
14. Permainan ketangkasan anak-anak sebesar 10%.
15. Permainana ketangkasan sebesar 25%.
16. Pertandingan olahraga, fitnes dan bina raga sebesar 15%.
17. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20%.
18. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 25%.

### *Advertisement Tax* (Pajak Reklame atau Pajak Iklan)

*Advertisement tax* atau pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas adanya penyelenggaraan reklame atau iklan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelengaaraan Pajak Reklame, menyatakan “Reklame (iklan) adalah benda, instrumen, aktivitas, atau media dengan wujud dan gaya yang berbeda-beda, yang diciptakan untuk tujuan bisnis, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat umum, benda, jasa, individu, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dapat didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

Operator periklanan atau penyelenggaraan reklame adalah orang atau organisasi yang menjalankan periklanan untuk pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya dan juga untuk dirinya sendiri. Pengumpulan data, pemetaan, pengorganisasian, dan penentuan titik iklan adalah bagian dari setiap rencana penempatan iklan. Etika, estetika, keamanan, keselarasan bangunan, dan lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah harus menjadi pertimbangan.

Penataan reklame yang diatur menurut PERDA Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2013 Pasal 5 yaitu: a. tempat; b. jenis; c. sifat; d. ukuran; e. konstruksi; dan f. kawasan. Sifat reklame yang sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Permanen:
2. Reklame papan
3. Reklame kendaraan
4. Reklame baliho (menggunakan kontruksi besi)
5. Reklame megatron/videotron
6. Non Permanen:
7. Reklame layar atau kain
8. Reklame baliho (menggunakan kontruksi kayu atau bambu)
9. Reklame selebaran
10. Reklame melekat atau stiker atau poster
11. Reklame udara
12. Reklame slide atau film
13. Reklame teks berjalan atau running taxt

Besarnya tarif pajak reklame yang sebagaimana di sebutkan yaitu sebesar 25%. Dasar pengenaan advertisement tax atau reklame yaitu dengan menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR), dengan rumus:

**NSR = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasaran**

**Reklame (NSPR)**

NJOR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**NJOR = (ukuran reklame x harga dasar ukuran reklame) +**

**(keinggian reklame x harga dasar ketinggian reklame)**

NSPR dapat dihitung dengan:

**NSPR = (NFR + NSP +NFJ) +Harga Dasar Nilai Strategis**

**NSP = [{Fungsi Ruang (Bobot x Skor (= Bobot x Skor)}] x Harga Dasar**

**Nilai Strategis**

Keterangan:

NFR = Nilai fungsi ruang

NSP = Nilai sudut pandang

NFJ = Nilai fungsi jalan

Perhitungan pajak reklame secara umum, yaitu:

**Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak**

**= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame**

### *Tax On Acquisition Of Righht To Land And Buildings* (Pajak Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Bea Prolehan Has Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut melalui jual beli, hibah, penukaran, atau cara lain atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, 2010 menyatakan “Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan untuk memperoleh tanah dan/atau bangunan”, serta “Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan, hak atas tanah meliputi hak pengelolaan di samping hak-hak tersebut di atas”.

Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud yaitu:

1. Pemindahan hak karena:
2. Jual beli
3. Tukar menukar
4. Hibah
5. Hibah wasiat
6. Waris
7. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
8. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
9. Penunjukan pembeli dalam lelang
10. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap
11. Penggabungan usaha
12. Pemekaran usaha
13. Hadiah
14. Pemberian hak baru:
15. Kelanjutan pelepasan hak
16. Di luar pelepasan hak
17. Hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud:
18. Hak milik
19. Hak guna usaha
20. Hak guna bangunan
21. Hak pakai
22. Hak milik atas satuan rumah susun
23. Hak perolehan

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak bea prolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat hak atas tanah dan bangunan.

Tarif Pajak BPHTB yang dikenakan sebesar 5% dengan dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai perolehan objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar menukar adalah nilai pasar
3. Hibah adalah nilai pasar
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar
5. Waris adalah nilai pasar
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
14. Hadiah adalah nilai pasar
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

### Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, termasuk pendapatan dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang khas, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Segala hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih pada suatu periode anggaran tertentu dimasukkan dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah selain pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kobandaha & Wokas, 2016). Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan cara masing-masing daerah dalam menghasilkan PAD. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil usaha milik desa (BUMD)
4. Alokasi dana desa (ADD)
5. Pendapatan dari sumber daya alam
6. Pendapatan dari aset dan kekayaan daerah.

Semakin besar pendapatan suatu daerah maka semakin besar pula kemampuannya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah Sendiri. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan suatu daerah, maka ketergantungannya akan semakin besar Pemerintahan daerah juga menjadi lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Semakin besar PADnya, kemudian kegiatan pemerintah dalam bidang pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat semakin mudah untuk mewujudkannya. Sebaliknya jika terjadi penurunan penerimaan PAD, Hal ini akan menghambat berbagai aktivitas pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah maka semakin besar pula kemampuannya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah Sendiri. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan suatu daerah, maka ketergantungannya akan semakin besar Pemerintahan daerah juga menjadi lebih besar dibandingkan pemerintah pusat (Koyongian, 2022).

### Kontribusi

Kata "kontribusi" berarti "partisipasi, keterlibatan, keterlibatan, atau kontribusi". Kontribusi dalam hal ini dapat berupa materi atau tindakan, benda nyata, seperti seseorang yang menyumbang pinjaman kepada pihak ketiga untuk kepentingan semua orang.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli masyarakat dapat sebesar ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pembagian Pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah lainnya yang sah antara lain adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya (Koyongian, 2022). Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak daera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Sumber:(Qolbiah & Fatimah, 2022)

### Efektivitas

Sejauh mana suatu tindakan atau aktivitas mencapai tujuan yang diinginkan atau menghasilkan hasil yang diinginkan disebut efektivitas. Menurut (Koyongian, 2022), Suatu organisasi telah beroperasi secara efektif jika tujuannya tercapai. Kisaran dampak dan dampak (outcome) keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program digambarkan dengan indikator efektivitas. Semakin tinggi kontribusi output yang timbul dari pencapaian tujuan atau sasaran tertentu, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi. Ketika mempertimbangkan gagasan efektivitas dalam kaitannya dengan pajak, yang dimaksud adalah sejauh mana target realisasi penerimaan pajak telah terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak diperlukan untuk mengukur efektivitas. Semakin besar efikasinya maka semakin mampu pula daerah tersebut dalam memenuhi kewajiban pemungutan pajaknya. Di sisi lain, menurunnya efektivitas menunjukkan semakin inefisiensi penerimaan pajak. Cara menghitung dan menentukan tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

Sumber: Qolbiah & Fatimah, (2022)

## Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur peningkatan pendapatan daerah serta kontribusi dan efektivitas pajak daerah. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Penulis | Judul | Hasil |
| 1 | (Sihite & Mulyandani, 2021) | Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. | Di Provinsi Humbang Hasundutan, Pajak Hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD antara tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebesar 0,044.Pajak restoran mempunyai pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap PAD antara tahun 2016 hingga 2020, dengan PAD sebesar 0,097. Sedangkan secara simultan pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD dan kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran tergoling kurang. |
| 2 | (Ayem & Hamrin, 2021) | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Biaya pengurusan hak atas bangunan dan hak atas tanah mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun secara statistik tidak signifikan. Pernyataan ini di dukung dengan  pengujian hipotesis mempunyai nilai taraf uji t sebesar 0,176 yaitu sebesar 0,314 > 0,05 dan menunjukkan adanya pengaruh signifikan namun positif terhadap pendapatan asli daerah. |
| 3 | (Samosir, 2020) | Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka | Secara parsial variabel Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Artinya jika variabel Pajak hotel ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Secara parsial variabel Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial variabel Pajak Hiburan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Reklame (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). |
| 4 | (Pandu, 2023) | Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018 – 2022 | Secara parsial Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,001. |
| 5 | (Alkholifi & Sofianty, 2021) | Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2019 | Pajak Hotel di duga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang. Pajak Hiburan di duga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang. |
| 6 | (Yadi & Hernawati, 2021) | Pengaruh Efektivitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Secara parsial Efektivitas Kontribusi dari pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun kontribusi pajak reklame terhadap pendaptan asli daerah cenderung berfluktiatif. Secara parsial Potensi dari pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Efektivitas Kontribusi dan Potensi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan |
| 7 | (Putra et al., 2023) | Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram | Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena di kota Mataram merupakan salah satu bagian dari Provinsi NTB dengan jumlah Hotel dengan tamu yang menginap cukup banyak, maupun banyaknya kegiatan pemerintah/swasta dilakukan di hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena di kota Mataram merupakan salah satu bagian dari Provinsi NTB dengan jumlah Restoran yang cukup banyak (lampiran 6). Sehingga, perolehan Pajak Restoran cukup besar di kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena Pajak Reklame merupakan salah satu penyumbang pajak bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram. Tidak berpengaruhnya Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena Pajak Parkir sering terjadinya kecurangan mengakibatkan target pajak Parkir ditargetkan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. |
| 8 | (Hikam et al., 2023) | Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi | Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara individu (parsial) pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji statistic bahwa pajak reklame sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena dengan berkembangnya pusat-pusat sentra bisnis dan kuliner seperti Mall, rumah mewah, apartemen, hotel, dan tempat makan Seribu Rasa. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. |
| 9 | (Amelia & Ishak, 2023) | Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi | Pajak Restoran dan Hotel secara positif tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020. Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan secara negatif tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016- 2020. Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, dan Penerangan Jalan bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi pada tahun 2016-2020. |
| 10 | (Saputri& Prasetyo, 2020) | Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018 | Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kuantitatif, menunjukan bahwa variabel independen (pajak hiburan) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan (tidak menentu signifikannya) atau dapat dilihat signifikannya dari pengguna pajak hiburan itu sendiri. pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh. |
| 11 | (Muhammad & Sukma, 2020) | Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung | Berdasarkan temuan uji pengaruh parsial yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan BPHTB. Data tersebut menunjukkan adanya korelasi yang lemah dan dapat diabaikan antara variabel Penerimaan BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung antara tahun 2011 hingga 2018. Hal ini dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif dan pajak yang tinggi. |

Sumber: Data diolah peneliti, (2024)

## Kerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pengaruh kontribusi dan efektivitas *entertainment tax, advertisement tax, dan tax on acquisition of right to land and buildings* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabaupaten Pemalang. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dijelaskan melalui Variabel yang memiliki hubungan antara variabel independen *entertainment tax* (X1), *advertisement tax* (X2) dan *tax on acquisition of right to land and buildings* (X3) dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y) seagai berikut:

1. Pengaruh *Entertainment Tax* terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penambahan area hiburan akan membantu pemasukan pajak hiburan guna meningkatkan PAD. Jika penerimaan *entertainment tax* seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, meliputi Tontonan film, Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana, Kontes kecantikan, Binaraga, Pameran, Diskotik, karaoke, Sirkus, akrobat, sulap, Permainan bilyar dan boling, Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan Pertandingan olahraga mendapati kenaikan maka pajak daerah akan mempengaruhi pendapatan daerah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sihite & Mulyandani, (2021), Alkholifi & Sofianty, (2021) dan Yulia, (2020) yang mengatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD.

Yulia, (2020) mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara individu (parsial) pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil terlihat bahwa pengaruh pajak hiburan lebih besar karena komponen pajak hiburan lebih banyak daripada pajak reklame. Sehingga realisasi pendapatan dari pajak hiburan bisa lebih besar dari pajak reklame.

Menurut Alkholifi & Sofianty, (2021) bagi instansi terkait lebih diperhatikan tingkat kemampuan pajak daerah yang dapat digali. Sehingga jarak antara realisasi dan target yang ditetapkan tidak terlalu jauh sehingga memperbaiki tingkat efektivitas. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, berbagai cara atau solusi dapat dilakukan agar mencapai target yang telah ditetapkan. Memberikan sanksi dan tindakan tegas bagi pihak siapa saja yang tidak patuh dan menyimpang pada aturan pemerintah daerah yang dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Memberikan sosialiasi kepada pihak wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan petugas pemungutan pajak agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak wajib pajak.

**H1: *Entertainment Tax* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah**

1. Pengaruh*Advertisement Tax* Terhadap Pendapatan AsliDaerah

*Advertisement tax* atau pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah perusahaan di suatu tempat maka semakin banyak pula pelaku bisnis yang menggunakan sistem reklame sebagai media iklan. Reklame yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

1. Permanen:
2. Reklame papan
3. Reklame kendaraan
4. Reklame baliho (menggunakan kontruksi besi)
5. Reklame megatron/videotron
6. Non Permanen:

1) Reklame layar atau kain

2) Reklame baliho (menggunakan kontruksi kayu atau bambu)

3) Reklame selebaran

4) Reklame melekat atau stiker atau poster

5) Reklame udara

6) Reklame slide atau film

7) Reklame teks berjalan atau running taxt

Media reklame di atas dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen maupun calon pemilih karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikam et al., (2023) yang mengatakan bahwa secara parsial pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

**H2: *Advertisement Tax* berpengaruh positifterhadap Pendapatan Asli Daerah**

1. Pengaruh *Tax On Acquisition Of Rignh To Land And Buildings* terhadap Pendapatan Asli Daerah

*Tax on acquisition of rignh to land and buildings* atau BPHTBadalah pajak yang dikenakan atas peolehan tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud yaitu:

1. Pemindahan hak

2. Pemberian hak baru

3. Hak atas tanah dan bangunan

BPHTB merupakan salah satu sumber yang potensial bagi pendapatan daerah, jika penerimaan pajak tersebut meingkat maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nuralifah et al., (2023) dan Pandu, (2023) yang menyatakan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Nuralifah et al., (2023) BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pajak BPHTB maka semakin meningkat pula penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan banyaknya pembangunan perumahan dan penjualan tanah maupun bangunan. Realisasi penerimaan BPHTB setiap tahunnya cenderung tidak stabil dikarenakan jenis pajak ini tidak bisa diprediksi penerimaannya karena tergantung dari pertumbuhan suatu transaksi. Jika terdapat banyak investor yang melakukan atau membeli tanah untuk investasi maka semakin baik lagi penerimaan realisasi yang akan diterima untuk meningkatkan pendapatan daerah. BPHTB merupakan salah satu penerimaan daerah dan kontributor besar bagi pajak daerah yang juga memberikan dampak terhadap PAD.

**H3: *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* berpengaruh positifterhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, maka kerangka pemikiran yang akan menunnjukkan hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut:

*Entertainment Tax*

(X1)

**H1**

Pendapatan Asli Daerah

(Y)

*Advertisement Tax*

(X2)

**H2**

**H3**

*Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*

(X3)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir**

1. **Hipotesis**

Penelitian tahap ketiga adalah pengembangan hipotesis penelitian, yang muncul setelah peneliti memaparkan landasan teori dan kerangka konseptual. Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dianggap sementara karena jawaban baru didasarkan pada teori yang relevan dan bukan berdasarkan fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belumjawaban yang empirik (Sugiyono, 2013). Hipotesis akan dibuktikan kebenarannya mengenai penggunaan formula statistik yang digunakan oleh peneliti.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga *Entertainment Tax* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

H2 : Diduga *Advertisement Tax* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

H3 : Diduga *Tax On Aquisition Of Right To Land An Buildings* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data atau informasi yang telah diperoleh guna memberikan gambaran keadaan yang lebih jelas dan rinci. Selanjutnya, informasi atau data dikumpulkan guna memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk mengkaji persoalan-persoalan terkini. Metode ini sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkritiempiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2013).

Penelitian deskriptif adalah Kajian semacam ini berupaya menyajikan gambaran (deskripsi) secara objektif terhadap suatu fenomena tertentu. Peneliti dapat mempelajari berbagai rincian tentang situasi sosial yang berbeda melalui studi deskriptif, yang dapat digunakan, misalnya, untuk mengkarakterisasi ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian (Purba & Simanjuntak, 2011).

Tujuan studi deskrptif untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi dan melibatkan pengumpulan data kuantitatif (Sekaran & Bougie, 2017). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah menghitung tingkat kontribusi dan efektivitas pajak hiburan, pajak reklame dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah kemudian presentase output tersebut penulis mendeskripsikan secara sistematis dan logis perihal keadaan yang sebenarnya dan dengan menarik sebuah kesimpulan sehingga mendapatkan suatu penyelesaian atas permasalahan yang diteliti. Serta untuk melihat pengaruh *entertainment tax, advertisement tax, dan tax on acquisition of right to land and building*s terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pemalang.

## Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah umum yang terdiri atas subyek atau obyek yang telah ditetapkan kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditentukan untuk dipelajari dan diambil keputusannya oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini yaitu 12 bulan x 5 tahun = 60 bulan yang berasal dari realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2022 yang di dapat dari Badan Pengelolaan Keuangn dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang.

## Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan sampel yang diambil harus representatif (Sugiyono, 2013). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bulan x 5 tahun = 60 bulan yang diperoleh dari laporan realisasi pajak hiburan, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada periode 2018-2022 di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik sampling jenuh yang mana semua angota populasi digunakan sebagai sampel.

## Devinisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. **Devinisi Konseptual**
2. **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan vaeriabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis variabel terikat maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku (Ayem & Hamrin, 2021). Tentu saja hal ini sangat penting, pemerintah daerah didesak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

1. **Variabel Independen (X)**

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Entertainment Tax* (X1), *Advertisement Tax* (X2), dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* (X3).

1. *Entertainment Tax*

*Entertaiment tax* atau pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Dapat pula diartikan pajak hiburan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan (Kamaroellah, 2021). Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 25, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.

1. *Advertisement Tax*

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 26 dan 27 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

1. *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan sumber daya tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, termasuk hak pengelolaan atas tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku (Sihombing & Sibagariang, 2020).

1. **Devinisi Operasional Variabel**

Devinisi operasional variabel adalah penegrtian variabel (yang diungkapkan dalam devinisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian ini, variabel independen (X) adalah *Entertainment Tax, Advertisement Tax, Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* dan variabel dependen (Y) adalah Pendaptan asli daerah. Berikut merupakan operasionalisasi dari masing-masing variabel penelitian:

**Tabel 3.1**

**Tabel Operasional Variabel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala pengukuran** |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (Y) | Pendapatan yang diperoleh daerah berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku | Sumber PAD antara lain:  1. Pajak Daerah  2. Retribusi daerah  3. BUMD  4. ADD  5. Pendapatan dari SDM  6. Pendapatan dari aset dan kekayaan daerah | Rasio |
| 2 | *Entertainment Tax* (X1) | *Entertainment tax* atau pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan | Rumus yang duginakan untuk mengukur nilai kontribusi pajak hiburan:  Rumus nilai efektivitas: | Rasio |
| 3 | *Advertisement Tax*(X2) | *Advertisement tax* atau pajak reklame dalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame | Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai kontribusi pajak reklame:  Rumus nilai efektivitas pajak reklame: | Rasio |
| 4 | *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*  (X3) | *Tax on acquisition of right to land and buildings* atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan | Rumus yang digunakan untuk mengukur nilai kontribusi pajak BPHTB:  Rumus nilai efektivitas pajak BPHTB: | Rasio |

## Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunaka data sekunder. Berdasarkan penjelasan (Sekaran & Bougie, 2017), Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya disebut sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari pelaporan target dan realisasi anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018-2022.

## Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini yaitu berupa observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung terhadap suatu keadaan atau objek yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Analisis Kontribusi dan Efektivitas *Entertainment Tax, Advertisement Tax* dan *Tax On Aquisistion Of Right To Land And Buildings* terhadap Pendapatan Asli Daerah, observasi tersebut dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang.

1. Dokumentasi

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan catatan-catatan atau data-data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agaenda, majalah, notulen dan lalin-lain sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dari dinas, dinas, kantor atau lembaga terkait.

## Metode Analisis Data

### Analisis Deskriptif

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya realisasi *Entertainment Tax, Advertisement Tax,* dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018-2022, data tersebut di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
2. Menentukan besarnya realisasi PAD selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018-2022, data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
3. Analisis Kontribusi *Entertainment Tax, Advertisement Tax,* dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini yaitu guna mengetahui kontribusi dari *Entertaiment Tax* (pajak hiburan), *Advertisement Tax* (pajak reklame), dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings* (pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Sumber:(Qolbiah & Fatimah, 2022)

Klasifikasi kontribusi nilai kontribasi, yaitu:

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Nilai Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| Presentase | Kriteria |
| 0, 00 – 10% | Sangat kurang |
| 10, 10% - 20% | Kurang |
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| Di atas 50% | Sangat baik |

Sumber: Dipdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

1. Analisis Tingkat Efektivitas *Entertainment Tax*, *Advertisement Tax* dan *Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*

Untuk dapat menjawab Rumusan yang kedua dapat dilakukan dengan menghitung untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Pemalang dengan rumus seperti di bawah ini:

Sumber: (Qolbiah & Fatimah, 2022)

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Presentase | Kriteria |
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Dipdagri, Kemendagri No. 690. 600. 327 Tahun 2006

1. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan berdasarkan pada kriteria klasifikasi kontribusi yang terdiri atas 6 kelompok yaitu: sangat kurang, kurang, sedang, cukup sedang, baik dan sangat baik. Kriteria kontribusi yang terdiri atas 5 kelompok yaitu: sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif, berdasarkan Dipdagri, Kemendagri No. 690 600 327 Tahun 20006.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda mengenai hipotesis penelitian, perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik terhadap data yang akan diolah. Uji regresi linier disebut sebagai model yang baik apabila model tersebut memenuhi sejumlah asumsi klasik, antara lain distribusi residu data yang normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Asumsi klasik perlu dipenuhi untuk menghasilkan model regresi dengan estimasi yang obyektif dan pengujian yang dapat dipercaya. Temuan analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BIRU (*Best Linear Unbiased Estimator*) jika satu kriteria saja tidak terpenuhi.

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residul memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsukan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsiini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumalah sampel kecil (Ghozali, 2018). Terdapat dua uji normalitaas yang sering di gunakan yaitu uji *kolmogorov-smirnov* dan *uji shapiro-wilk*. Pada penelitian ini akan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* yaitu pengujian apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2018). Hal tersebut bearti standar eror besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Ada dua cara untuk melakukan pengujian multikolinearitas yaitu (1) Nilai Tolerance dan (2) Variance Inflation Factors (VIF). Batas dari VIF yaitu 10 dan nilai tolerance adalah 0,1. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dengan pengujian multikolinearitas ini dapat diketahui apakah ada masalah multikolinearitas yang dapat berpengaruh terhadap hasil analisis regresi dan menjadikan hasil tersebut tidak valid.

1. Uji Hesteroskedasitas

Tujuan dari uji heteroskeditas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regreai baik adalah model Homoskesdatisitas atau tidak terjadinya Hoteroskedasitas.

1. Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada peroide t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2018).

### Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen bertambah atau berkurang. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi

X1 : *Entertainment tax*

X2 : *Advertisement tax*

X3 : *Tax on acquisition of right to land and buildings*

Ɛ : Standar Error

Sumber: (Ghozali, 2018)

### Pengujian Hipotesis

1. Uji F (F *test*)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara apakah variabel independen (*entertainment tax, advertisement tax dan tax on acquisition of right to land and buildings*) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

1. Uji t.

Uji t (uji parsial) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (*Entertainment Tax, Advertisement Tax dan Tax On Acquisition Of Right To Land And Buildings*) tehadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Pengujian ini dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,025 (α=25%) maka hipotesis yang diajukan diterima atau signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,025 (α=25%) maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

### Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah metrik yang mengukur seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang diamati, menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut. Biasanya disimbolkan sebagai R2, nilainya berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai R2 yang kecil menujukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai R2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasnya terhadap banyaknya variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak dari peneliti yang memakai nilai *Adjusted* R2. Nilai *Adjusted* R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Koefisien determinasi dihitung dengan rumus R *square* (Ghozali, 2018) sebagai berikut:

Rumus:

KD = 𝑟2 X 100%

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi.

r2 = Kuadrat koefisien korelasi